



Kesultanan Bima sebagai basis Islamisasi di Indonesia Timur sejak abad 17 M

Vita Sabrina Azda Laili, Arrum Intan Setya Yuniar, Lady Abrenda

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang 65145, vita.sabrina.1907316@students.um.ac.id,
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang 65145, arrum.intan.1907316@students.um.ac.id,
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang 65145, lady.abrenda.1907316@students.um.ac.id,

Abstract

Islamization in Nusantara brought about many significant social life changes, one of which was the political aspect. The emergence of sultanates in the western to eastern regions of the archipelago is proof that Islam can be accepted. Bima is one Island that is not free from the influence of Islam. The Islamization process in Bima, which was initially Hindu in style, took place through political power and on the initiative of traders from Gowa-Tallo, Luwu and Bone who brought Islam, as well as advice by the role of ulama or religious leaders who used a cultural approach in the process of Islamization efforts. The method of Islamization brought many changes to Hadrat Law and Islamic Law in the Sultanate of Bima. Changes that occur in Bima that continue to experience developments there include the development of law, business, and the development literature. The various changes in terms of tradition or custom then extended to different Bima power regions. The sultanate, founded in the 17th century AD, has a strategic area so that it has a significant impact on the process of Islamization in eastern Indonesia, especially Sumbawa. Thus making the Sultanate of Bima the basis for Islamization in Eastern Indonesia since the 17th century AD. The research method used is historical research methods.

Keywords

Islamzation, Islam, Bima Sultanate

Abstrak

Islamisasi di Nusantara membawa banyak perubahan yang signifikan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni aspek politik. Munculnya kesultanan di wilayah barat hingga timur Nusantara menjadikan bukti bahwa Islam dapat diterima di Nusantara. Bima adalah salah satu wilayah yang tidak luput dari pengaruh Islam. Proses Islamisasi di Bima yang pada awalnya bercorak Hindu berlangsung melalui pengaruh politik dan atas prakarsa pedagang Gowa-Tallo serta Luwu dan Bone yang membawa agama Islam, juga dipengaruhi oleh peran ulama atau tokoh agama yang menggunakan pendekatan budaya sebagai usaha dalam proses Islamisasi. Proses Islamisasi ini membawa banyak perubahan pada Hukum Hadat dan Hukum Islam di Kesultanan Bima. Berbagai perubahan yang terjadi dari segi tradisi atau adat tersebut kemudian meluas ke berbagai wilayah sekitar kekuasaan Bima. Kesultanan yang berdiri pada abad 17 M, memiliki wilayah yang strategis sehingga memberikan dampak yang besar dalam proses Islamisasi di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Sumbawa. Sehingga menjadikan Kesultanan Bima sebagai basis Islamisasi di Indonesia Timur sejak abad 17 M. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah.

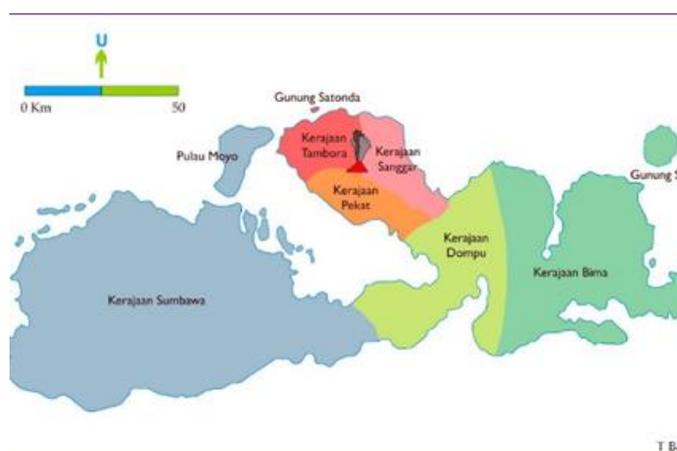
Kata kunci

Islamisasi, Islam, Kesultanan Bima

Pendahuluan

Islamisasi merupakan proses konversi masyarakat menjadi Islam, yang di dalam penggunaan kontemporer berkaitan dengan konversi sistem sosial dan politik Islam ke dalam masyarakat dengan latar belakang sosial dan politik pribumi yang berbeda (Ishari, 2014). Proses Islamisasi pada masa lampau tentu memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi kondisi saat ini. Begitu pula dengan Indonesia, Islamisasi yang berlangsung akibat perdagangan dan teknologi transportasi laut pada masa lampau menjadikan Islam di Nusantara memiliki corak yang khas.

Proses Islamisasi di Nusantara dapat diamati dari berbagai peninggalan hingga kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, karena Islam membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Aspek politik menjadi salah satu yang sangat terpengaruh kedatangan dan diterimanya Islam di Nusantara. Kemunculan kesultanan dari bagian barat hingga timur Nusantara pada masa lampau menjadi bukti jelas bahwa Islamisasi juga terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia saat ini. Bima yang kini, merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) (berbatasan dengan Dompu, selat Sape, Laut Flores dan Samudra Hindia) (Mawaddah, 2017) juga menjadi wilayah yang tidak dapat luput dari pengaruh Islam. Kesultanan Bima yang berdiri sekitar abad 17 M memperlihatkan bahwa daerah dengan letak yang strategis ini juga terdampak Islamisasi yang terjadi pula di beberapa wilayah di sekitar Bima.



Gambar 1. Peta Wilayah Kekuasaan Bima
(Sumber: Bachtiar, 2020)



Gambar 2. Istana Kesultanan Bima Tahun 1949.
(Sumber: *Collectie Tropenmuseum Het paleis van de sultan van Bima*)



Gambar 3. Istana Kesultanan Bima
(Sumber: KITLV Picture, Leiden)

Kesultanan Bima juga memberikan dampak dalam proses Islamisasi khususnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, berdasarkan paparan diatas, maka topik yang akan diulas meliputi 1) Bagaimana sejarah berdirinya Kesultanan Bima?, (2) Bagaimana pengaruh Islam terhadap aspek hukum dan sosial Kesultanan Bima?, serta (3) Bagaimana peran Kesultanan Bima dalam proses Islamisasi di Indonesia Timur?

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang memiliki empat tahapan. Tahapan pertama yakni heuristik atau pengumpulan sumber dengan menggunakan teknik *library research*, yakni dengan meninjau berbagai publikasi sumber-sumber sejarah, karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan topik yang hendak diteliti dalam penulisan ini, antara lain sejarah, politik, hukum, sosial Kesultanan Bima sejak abad ke 17 M. Tahapan kedua adalah verifikasi sumber, tahap ketiga adalah interpretasi atau menyintesis, dilanjutkan dengan tahapan terakhir yakni tahapan penulisan atau historiografi.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Berdirinya Kesultanan Bima

Sultan pertama yang memimpin Kesultanan Bima adalah Sultan Abdul Kahir Ma Bata Wadu (Mukhlis, 2005) yang sebelumnya bernama Raja La Ka'i, raja ke- 27 Kerajaan Bima (Mawaddah 2017). Berikut merupakan silsilah penguasa kesultanan Bima (Haris, 2006):

1. Masa kepemimpinan ± 1620-1640 M yakni Abdul Kahir, nama anumerta Mantau Wata Wadu (yang mempunyai kubur batu), lahir + 1583, kawin Daeng Melu, wafat 22 Desember 1640.
2. Masa kepemimpinan 1640-1682 M yakni I Ambela Abi'l Khair Sirajuddin, nama anumerta Mantau Uma Jati (yang mempunyai rumh jati), putra pertama, lahir + 1629, kawin Karaeng Bontojene (putri Raja Gowa Muhammad Said) 1646, wafat 23 Juli 1682.
3. Masa kepemimpinan 1682-1687 M yakni Nuruddin Abu Bakar All Syah, nama anumerta Mawa'a Paju (yang membawa payung), putra kedua, nama kecil Mapparabung Daeng Mattalli' Karaeng Panaragang, lahir 13 Desember 1651, kawin Daeng Tamemang 1684, wafat 23 Juli 1687.
4. Masa kepemimpinan 1687-1696 M yakni Jamaluddin Ali Syah, nama anumerta Mawa'a Romo (yang membawa mulut/ laras), putra ketiga lahir 1673, kawin Karaeng Tanatana 1688, dibuang ke Batavia 1695, wafat 6 Juli 1696.
5. Masa kepemimpinan 1696-1731 M yakni Hasanuddin Muhammad Syah, nama anumerta Mabata Bo'u (yang mempunyai kubur baru), putra keempat, nama kecil Mapatalli' Syaad Syah, lahir 7 September 1689, kawin Karaeng Bissangpole 1714, wafat 23 Januari 1731.
6. Masa kepemimpinan 1731-1748 M yakni Alauddin Muhammad Syah, nama anumerta Manuru Daha (yang berdiam di Daha) putra kelima, nama kecil, Abdullah Sulaiman All Syah, lahir 1706, kawin Karaeng Tanasanga (putri Sultan Gowa Siorajuddin) 1727, wafat 17 atau 27 Mei 1748.
7. Masa kepemimpinan 1748-1751 M yakni Kamalat Syah, putri keenam, nama kecil Rante Patola Sitti Rabi'ah, lahir 27 - 4 -1728, kawin Karaeng Kanjilo 1750, diturunkan oleh Belanda 28 Juni 1751, wafat 31 Agustus 1773.
8. Masa kepemimpinan 1751-1773 M yakni Abdul Kadim Muhammad Syah, nama anumerta Mawa'a Taho (yang membawa kebaikan), putra ketujuh, nama kecil Sri Nawa, lahir 10 Juni 1735, wafat 31 Agustus 1773.
9. Masa kepemimpinan 1773-1817 M yakni Abdul Hamid Muhammad Syah, nama anumerta Mantau Asi Saninu (yang mempunyai istana cermin), putra kedelapan, lahir + 1762, wafat 14 Juli 1817.
10. Masa kepemimpinan 1817-1854M yakni Ismail Muhammad Syah, nama anumerta Mantau Dana Sigi (yang mempunyai tanah mesjid), putra kesembilan, lahir 28 Mei 1797, wafat 30 Mei atau 4 Juni 1854.
11. Masa kepemimpinan 1854-1868 M yakni Abdullah, nama anumerta Mawa'a Adil (yang membawa keadilan), putra kesepuluh, lahir 1844, wafat 10 Agustus 1868.

12. Masa kepemimpinan 1868-1881 M yakni Abdul Aziz, nama anumerta Mawa'a Sampela (yang membujang), putra kesebelas, lahir + 1863, wafat 30 Juni 1881.
13. Masa kepemimpinan 1881-1915 M yakni Ibrahim, nama anumerta Ma Taho Parange (yang baik perangai), putra kesebelas, lahir 19 Februari 1866, wafat 6 Desember 1915.
14. Masa kepemimpinan 1915-1951 M yakni Muhamad Salahuddin, nama anumerta Marrbora di Jakarta, Ma kadidi Agama (yang meninggal di Jakarata, yang menegakkan agama), putra ketiga belas.



Gambar 4. Sultan Salahuddin
(Sumber: KITLV Picture, Leiden)

Masuk Islamnya Raja La Ka'i pada tahun 1621 M (Mawaddah, 2017) sekaligus menjadi awal berdirinya Kesultanan Bima. Proses Islamisasi di Kerajaan Bima yang sebelumnya bercorak Hindu (Zuriatin dan Nurhasana, 2018) lekat dengan Kesultanan Gowa yang pada saat itu merupakan salah satu pusat kerajaan Islam di Nusantara. Pengaruh Gowa secara jelas terlihat ketika Kesultanan Bima menjadi vassal dari Kesultanan Gowa sehingga Bima berkewajiban mengirimkan upeti setiap tahunnya. Hubungan politik keduanya juga nampak dari pernikahan yang antara Sultan Abdul Kahir dan adik ipar dari Sultan Alauddin (Sultan Gowa) yang bernama Daeng Sikonto Putri Karaeng (Safruddin, 2016).

Selain pengaruh politik, Islamisasi di Bima tentu juga merupakan pengaruh dari intrekasi dagang yakni pedagang Gowa-Tallo serta Luwu dan Bone yang membawa agama Islam dan berlabuh di Sape (Majid dalam Zuriatin dan Nurhasanah, 2018). Kedatangan pedagang yang membawa Islam yang berlabuh di Sape tersebut terjadi pada tahun 1618 yang tertulis dalam Bo Sangaji Kai (Majid dalam Zuriatin dan Nurhasanah, 2018) sebagai berikut:

Hijratun Nabi saw 1028 hari bulan Jumadil-awal telah datang dipelabuhan Sape saudara Daeng Mangali di Bugis Sape dengan orang Luwu dan Tallo dan Bone untuk berdagang. Kemudian pada malam hari datang menghadap Ruma Bumi Jara yang memegang Sape untuk menyampaikan Ci'lo kain bugis dan keris serta membawa agama Islam Kerajaan Gowa. Dan

Tallo, dan Luwu, dan Bone sudah masuk Islam dan Daeng Malabo dan keluarganya sudah masuk Islam seluruhnya (Aminullah dan Nasaruddin, 2017).

Dari yang tertulis dalam *Bo Sangaji Kai*, dapat diketahui bahwa para pedagang tersebut sekaligus juga membawa kabar bahwa penguasa daerah lain yakni Gowa, Tallo, Luwu dan Bone juga telah memeluk Islam. Proses Islamisasi di Bima tentunya juga tidak terlepas dari peran ulama atau tokoh agama Islam. *Datuk Ri Bandang* dan *Datuk Di Tiro* yang berasal dari Sumatera merupakan dua ulama yang dikenal memiliki peran penting dalam proses Islamisasi di Bima (Mawaddah, 2017).

Proses Islamisasi yang dilaksanakan oleh *Datuk Di Tiro* dan *Datuk Ri Bandang* menggunakan pendekatan budaya dengan memasukkan jiwa Islam (Safruddin, 2016). Pendekatan budaya juga dilakukan oleh beberapa ulama lain pada masa kepemimpinan Sultan kedua Bima, *Abil Khair Sirajjudin*, para ulama tersebut antara lain *Datuk Raja Lelo*, *Datuk Iskandar*, *Datuk Selangkote*, *Datuk Lela*, dan *Datuk Panjang* (Zuriatin dan Nurhasanah, 2018). Peran beberapa ulama dalam Islamisasi Bima ini juga memperlihatkan bahwa Ulama dari Melayu memiliki peran yang dominan dan signifikan.

Pengaruh Islam Terhadap Aspek Hukum dan Sosial Kesultanan Bima

Bergantinya status kerajaan bercorak Hindu menjadi Kesultanan tentu menjadikan perubahan mendasar pada hukum dan kondisi sosial masyarakat Bima. Secara garis besar hukum yang berlaku di Bima pada masa Kesultanan meliputi Hukum Hadat dan Hukum Islam. Hukum secara jelas ditulis dan dikodifikasikan pada masa Sultan Abdul Hamid tepatnya pada tahun 1797, Sultan memerintahkan untuk mencatat dalam *Bo Sangaji Kai* sebuah kitab undang-undang (119 pasal) tentang peradilan, hukum perdata dan hukum pidana, tata sosial hingga pertanian. Jika dilihat dari administrasi ketatanegaraan hukum di Kesultanan Bima meliputi tiga bab, (1) mengenai hukum adat yang dibagi menjadi hukum pidana hadat dan perdata hadat, (2) mengenai hukum Syahbandar, (3) mengenai hukum agama (Mawaddah 2017). Sebuah lembaga peradilan Islam juga didirikan pada tahun 1788 yang disebut sebagai *Mahkamah Syarr'iyah* (Salahuddin, 2005).

Meski mulai ditulis dan dikodifikasi dengan jelas pada masa Sultan Abdul Hamid, namun bersandingnya Hukum Hadat dan Hukum Islam sebagai landasan di Kesultanan Bima telah digunakan sejak Sultan pertama memimpin (Sultan Abdul Kahir), salah satunya nampak dari pandangan hidup Suku Mbojo (salah satu suku di Bima) yakni “*Maja Labo Dahu*”, malu dan takut melanggar aturan agama dan adat-istiadat. Pandangan tersebut secara jelas diimplementasikan dengan diberikannya hukum dera (hukum Islam), hukum senda (hukum hadat), dan dikucilkan atau diusir bagi pelaku zina (Aminullah dan Nasaruddin, 2017).

Berlakunya Hukum adat dan Hukum Islam di Kesultanan Bima memberikan corak bagi kondisi sosialnya. Posisi Islam yang menjadi dasar dari pembuatan maupun implementasi hukum tentu juga menjadikan diperlukannya peran Ulama dalam segala aktivitas maupun aspek kehidupan masyarakat Bima, yang kemudian mengakibatkan

perubahan pada komposisi masyarakat Bima, yakni dengan datang dan menetapnya orang-orang Melayu di Bima (Safruddin, 2016).

Selain hukum, pendekatan budaya yang digunakan sebagai usaha atau strategi dalam proses Islamisasi oleh Ulama tentu juga memiliki andil yang besar dalam perubahan aspek sosial masyarakat Kesultanan Bima yang dapat diamati dari berbagai upacara atau tradisi yang memperlihatkan pengaruh Islam dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah keikutsertaan Ulama dalam prosesi Pita Nggahi (peresmian pertunangan) dan prosesi Peta Kapanca (menempelkan daun pacar pada calon pengantin wanita oleh ibu-ibu pemuka adat disertai acara pengajian, tokoh masyarakat dan agama) yang memang dikemas untuk menarik perhatian sekaligus mengenalkan Islam pada masyarakat (dilaksanakan sejak pemerintahan Sultan kedua, Abil Khair Sirajuddin) (Aminullah dan Nasaruddin, 2017).

Pelaksanaan *Hanta ua pua* (rombongan atau usungan perjalanan dari kampung menuju ke Istana Kesultanan Bima dan merupakan rangkaian sebelum peringatan Maulud Nabi di Istana Kesultanan Bima), Zikir atau Jiki, hingga diwajibkannya perempuan Bima yang sudah akil baligh menggunakan Rimpu (Zuriatin dan Nurhasanah, 2018). Beberapa hal tersebut merupakan contoh lain implementasi nilai-nilai Islam dalam adat atau tradisi masyarakat Bima. Pengaruh Islam terhadap aspek sosial di Bima juga nampak dari dibuatnya karya sastra Bima pada abad 17-19 M.



Gambar 5. Kegiatan Hanta Ua Pua pada Masa Kini
(Sumber: Nurrofika dan Murdiono, 2020)



Gambar 6. De Draagstoel (Pabule) van de Sultan Bima
(Sumber: KITLV Picture, Leiden)



Gambar 7. Penggunaan Rimpu pada Masa Kini
(Sumber: Fitriana and Suharno, 2019)

Salah satu karya sastra tersebut adalah Hikayat Sang Bima, berupa hikayat yang tokoh-tokohnya adalah tokoh pewayangan Mahabharata (Tondo, 2005). Karya sastra atau kitab juga dibuat sekitar tahun 1881. Kitab tersebut adalah *Jawharat al-Ma`ârif* atau disebut juga sebagai *Kitab Kewajiban Sultan* (Mukhlis, 2005).

Peran Kesultanan Bima dalam Islamisasi di Indonesia Timur sejak abad 17 M

Peran Kesultanan Bima dalam proses Islamisasi di Indonesia Timur khususnya Sumbawa tentu sangat besar. Peran tersebut kini dapat diamati dari agama yang dipeluk oleh Suku Mbojo (75 % penduduk Bima merupakan Suku Mbojo) yang mayoritas beragama Islam serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (Aminullah dan Nasaruddin, 2017).

Masuk Islamnya Pemimpin Bima (Raja La Ka'i) tentu juga memberikan dampak yang luar biasa bagi kepercayaan yang dianut mayoritas penduduk Bima pada abad 17 M. Zuriatin dan Nurhasanah (2018) menyatakan bahwa proses Islamisasi pada masa awal Kesultanan Bima sama dengan daerah lain di Nusantara, atau disebut sebagai teori *topdown*, yang nampak dari setelah masuk Islamnya Raja beserta pembesar istana, kemudian menjadikan penduduk berbondong-bondong masuk Islam pula.

Proses Islamisasi tentu tidak hanya terjadi ketika awal berdirinya kesultanan melainkan gencar dilakukan dan terus berkembang. Perkembangan hukum, pembentukan lembaga agama, perkembangan sastra, berbagai tradisi atau adat (yang dikemas dengan budaya) dengan andilnya Kesultanan dalam pelaksanaannya tentu memperlihatkan bagaimana Kesultanan Bima berperan dalam Islamisasi. Bukan hanya Islamisasi dengan perpindahan kepercayaan masyarakatnya semata melainkan juga terus mengenalkan Islam, sekaligus meletakkan Islam sebagai landasan dalam segala aktivitas masyarakat Kesultanan Bima, baik dalam mata pencaharian maupun dalam pelaksanaan segala tradisi atau adat masyarakat Bima.

Kesimpulan

Islamisasi di Nusantara membawa banyak perubahan yang signifikan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni aspek politik. Salah satu bukti proses Islamisasi di Nusantara yaitu munculnya berbagai kesultanan Islam di bumi Nusantara ini, tak terkecuali di daerah timur Indonesia, tepatnya di Bima, Nusa Tenggara Barat, terdapat Kesultanan Bima. Kesultanan Bima sebelumnya merupakan kerajaan yang berbasis agama

Hindu, kemudian pada 1621 M, raja yang memimpin, yaitu Raja La Ka'i masuk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Abdul Kahir Ma Bata Wadu, hal tersebut adalah awal dari berdirinya kesultanan Bima. Proses Islamisasi di Kesultanan Bima ini dipengaruhi oleh politik, perdagangan dan peran dari beberapa ulama dari Melayu dengan menggunakan pendekatan budaya.

Proses Islamisasi ini juga berpengaruh pada hukum dan sosial Kesultanan Bima. Hukum yang berlaku pada masa kesultanan adalah hukum Islam dan hadat. Namun, baru ditulis dengan jelas serta dikodifikasi pada tahun 1797 atas perintah dari Sultan Abdul Hamid, dengan mencatat dalam Bo Sangaji Kai sebuah kitab undang-undang berisi 119 pasal. Pada aspek sosial, proses Islamisasi ini dapat dilihat dari upacara atau tradisi yang berbau Islam, hal ini karena pendekatan budaya yang dilakukan oleh ulama. Selain itu, juga dapat dilihat dengan adanya karya sastra Bima pada 17-19 M dan pada tahun 1881, dibuat Kitab Jawharatal-Ma`arif.

Banyak penduduk Bima mulai masuk Islam sejak mengetahui Raja La Ka'i mulai masuk Islam, proses Islamisasi tersebut semakin berkembang karena terus menerus dilakukan. Islam di dalam segala kehidupan masyarakat digunakan sebagai landasannya. Suku Mbojo adalah mayoritas penduduk Bima, mereka memeluk ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup mereka. Hal tersebut adalah bukti dari betapa besarnya peran Kesultanan Bima dalam proses Islamisasi di bagian timur Nusantara.

Daftar Rujukan

- Aminullah, dan Nasaruddin. (2017). Wajah Islam nusantara pada tradisi peta kapanca dalam perkawinan adat Bima. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Kelslaman Dan Kemanusiaan* 1(1): 1–24.
- Bachtiar, T. (2020). Tiga kesultanan di kaki Tambora Raya. *Kabar Alam.com* tersedia dalam <https://kabaralam.com?wisata-alam/tiga-kesultanan-di-kaki-tambora-perlaya/2>, diakses pada 9 desember 2020.
- Fitriana, Ayu, dan Suharno. (2019). Budaya rimpu sebagai eksistensi perempuan Islam di tanah Bima. *Jurnal Antropologi* 02: 211–17.
- Haris, Tawalinuddin. (2006). Kesultanan Bima di Pulau Saumbawa *Jurnal Wacana* 8 (1): 17-31.
- Ishari, Nurhafid. 2014. Islamisasi dan embrio institusi pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna* 7 (2): 114–27.
- KITLV Picture, Leiden. (1945). *Muhammed Salahuddin, sultan van Bima*, diakses pada 9 Desember 2020.
- KITLV Picture, Leiden. (1945). *De Draagstoel (Pabule) van de Sultan Bima*, diakses pada 9 Desember 2020.
- Murrofika dan Murdiono M. (2020). Tradisi Hanta Ua Pua sebagai upaya pelestarian budaya religi di Bima. *Jurnal Wacana* 22 (1): 10-18.
- Mawaddah, Kartini. (2017). Diplomati Sultan Abdul Hamid Di Kerajaan Bima Tahun 1773- 1817 M. *Juspi* 1 (1): 139–53.
- Mukhlis. (2005). Wacana politik dan kepemimpinan Islam dalam naskah kuno Kesultanan Bima. *Ulumuna* IX (1): 277-94
- Safuruddin. (2016). Pola adaptasi dan proses Islam di Raba Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 2 (1).

- Salahuddin, Muh. (2005). Mahkamah syar'iyah di Kesultanan Bima: wujud dialektika hukum antara Islam dan adat muh. *Ulumuna IX* (1):189-201.
- Tondo, Fanny Henry. (2005). Tinjauan buku Kerajaan Bima dalam sastra dan sejarah, Henri Chambert Loir. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 7 (1): 167-70.
- Zuriatin & Nurhasanah. (2018). Kebudayaan Islam yang berkembang di Kesultanan Bima pada abad ke XVII M. *Jurnal Pendidikan IPS* 8 (2): 129-38.